



Implementasi *FRESH Office* DJPb



FRESH OFFICE

Keterangan	
Pengertian	Merupakan bentuk awal penahapan implementasi Activity Based Workplace (ABW) pada Kantor Pusat dan Instansi Vertikal DJPb, dengan konsep Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy (FRESH) Office
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Mengimplementasikan konsep baru pelaksanaan pekerjaan sesuai New Ways of Working (NWOW)• Menciptakan gedung dan ruang kerja yang Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy (FRESH)• Meningkatkan kenyamanan pegawai & pengguna layanan• Meningkatkan produktivitas pegawai
Dampak/ <i>Stakeholder</i>	Unit kerja di lingkup DJPb, Satuan Kerja/Mitra Kerja, Unit Eselon I lain di Kemenkeu merasakan peningkatan kenyamanan dalam bekerja dan mendapatkan layanan
Acceptance Criteria	<ul style="list-style-type: none">• Terciptanya buku pedoman standardisasi sarana dan prasarana Fresh Office DJPb• Tersedianya alokasi dana implementasi Fresh Office DJPb• Tersedianya sarana dan prasarana pada 17 kantor yang ditunjuk, yang sesuai dengan konsep ABW Kementerian Keuangan• Peningkatan pemahaman dan kapasitas pegawai sesuai konsep New Ways of Working (NWOW)
Keterkaitan IS/IKU	IS #1 "Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: New Ways of Working "
Unit in Charge	Bagian OTL, Bagian Keuangan, Bagian Umum, Bagian SDM dan Bagian KI; Setditjen



Digitalisasi MP PNBP tidak Terpusat



Keterangan	
Pengertian	Merupakan simplifikasi proses bisnis pelaksanaan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP Tersebar (tidak Terpusat) yang dikelola secara langsung oleh Satker Pengguna PNBP mulai dari proses rekonsiliasi/konfirmasi rekapitulasi setoran PNBP sampai dengan proses perhitungan MP PNBP
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBP yang efisien dan efektif• Time and cost saving melalui simplifikasi proses bisnis terkait administrasi pengajuan dan persetujuan• Mempercepat pelaksanaan eksekusi kegiatan dan belanja pada Satker K/L pengelola PNBP melalui penggunaan dana PNBP secara langsung sehingga output kegiatan dapat dicapai secara lebih optimal• Mengurangi penumpukan beban pekerjaan pada akhir tahun anggaran• Meningkatkan kualitas pelayanan Satker pengelola PNBP kepada masyarakat
Dampak/ <i>Stakeholder</i>	Seluruh satker K/L secara nasional
Acceptance Criteria	<ul style="list-style-type: none">• Penerbitan Peraturan terkait Modul MP PNBP tidak Terpusat• Penyelesaian Modul MP PNBP tidak Terpusat• Implementasi Modul MP PNBP tidak Terpusat
Keterkaitan IS/IKU	IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"
Unit in Charge	Direktorat PA dan Direktorat SITP (Joint QW)



Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah



DIGITALISASI
sistem
pembayaran
pemerintah

Keterangan

Pengertian	Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara yang efektif merupakan implementasi digitalisasi pengelolaan rekening pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga, serta pelaksanaan digitalisasi sistem pembayaran penerimaan dan digitalisasi sistem pembayaran pengeluaran negara
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Menciptakan ekosistem yang mengintegrasikan Satker K/L, Penyedia Barang/Jasa (UMKM), Perbankan, dan Kuasa BUN dalam proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Uang Persediaan• Mendukung penerapan shared service dan schedule payment date• Mendukung program pemberdayaan dan digitalisasi UMKM• Mengatur pengurangan jumlah rekening pemerintah dalam bentuk giro• Mengatur pembangunan sistem monitoring rekening yang berbasis elektronik dan real time• Mengatur wewenang BN dalam pengendalian rekening dan peningkatan optimalisasi kas dari pengelolaan saldo rekening pemerintah• Mempercepat setoran pajak belanja Pemerintah Daerah (APBD) ke kas negara• Memperluas kanal penerimaan negara dalam rangka mendukung inklusi keuangan negara (menjangkau UMKM dan daerah terpencil)
Dampak/ <i>Stakeholder</i>	K/L, Pemda, KPPN, Perbankan, Vendor/Rekanan Pengadaan Barang/Jasa (UMKM)
<i>Acceptance Criteria</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan rekening tunggal K/L termonitor pada dashboard bank• Satker K/L dan UMKM telah mengimplementasikan Sistem Digital Payment-Marketplace yang dibiayai dengan UP• Bank Persepsi peserta telah go live kanal 7020 (SP2D Online)• Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) peserta telah go live kanal penerimaan negara
Keterkaitan IS/IKU	<ul style="list-style-type: none">• IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"• Mendukung IKU Kemenkeu Wide: Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara
<i>Unit in Charge</i>	Direktorat PKN, Direktorat SITP



Digitalisasi Pembiayaan UMi



Keterangan

Pengertian	Transformasi digitalisasi UMi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan usaha UMi terutama dalam masa pandemi saat ini. Digitalisasi UMi terkait dengan marketplace online dan transaksi UMi melalui cashless . Dalam mendorong UMi untuk masuk dalam marketplace online dengan memanfaatkan platform Digitalisasi UMKM dalam transaksi belanja pemerintah melalui platform pada Direktorat PKN, maupun marketplace online yang telah ada saat ini seperti Bukapalapak, Gojek dan lain sebagainya. Pemilihan platform tersebut akan menyesuaikan dengan kesesuaian antara jenis produk milik debitur dan pemilihan channel online yang tepat. Dalam implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi, debitur pembiayaan UMi akan diperkenalkan ke dalam channel pemasaran secara online melalui marketplace berbasis online termasuk pemanfaatan media sosial serta sebagai bagian dari implemetasi PMK 193/2020 di mana penyaluran pembiayaan UMi dapat dilakukan secara cashless melalui uang elektronik
Tujuan	Mengimplementasikan piloting digitalisasi UMi untuk memanfaatkan marketplace online dan transaksi secara cashless dalam rangka meningkatkan daya saing debitur
Dampak/ <i>Stakeholder</i>	Kementerian Keuangan, Penyalur dan Lembaga Linkage Pembiayaan UMi, Debitur Pembiayaan UMi, PJSP Uang Elektronik, Marketplace Online
Acceptance Criteria	<ul style="list-style-type: none">Implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi secara pilotingKajian atas implementasi Digitalisasi Pembiayaan UMi
Keterkaitan IS/IKU	<ul style="list-style-type: none">IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (Kemenkeu-Wide Tahun 2021)
Unit in Charge	Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya, Dit. SMI dan Satker BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)



Go Live Investasi Pemerintah (Tahap I)

Keterangan

Pengertian	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2020, PMK 53/2020 sebagai peraturan teknis pelaksanaan PP 63/2019 telah ditetapkan dan telah dilaksanakan pula sosialisasi secara berkala tentang Investasi Pemerintah kepada para stakeholders. Demikian pula telah dilaksanakan langkah-langkah penyiapan penerapan implementasi PP 63/2019 yang antara lain berupa pengusulan pembentukan Satker KIP yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan• Tahun 2021 merupakan tahap pertama dari implementasi PP 63/2019 dan PMK 53/2020 yang akan dimulai dengan pembentukan infrastruktur Investasi Pemerintah berupa pembentukan Satker KIP serta penyusunan tahapan penyaluran investasi sesuai dengan PP 63/2019, sampai dengan Investasi Pemerintah Go Live• Pada Tahun 2022 direncanakan telah terbentuk ekosistem Investasi Pemerintah yang semakin berkembang dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia
Tujuan	Implementasi Investasi Pemerintah sesuai dengan tata Kelola yang diatur dalam PP 63/2019 dan PMK 53/2020
Dampak/ Stakeholder	Kementerian Keuangan/BUMN dan BUMD/Pemda/Kementerian Lainnya/BLU lainnya
Acceptance Criteria	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan Infrastruktur Investasi Pemerintah (Sekretariat, Satker KIP beserta anggota komite, Penunjukan OIP)• Dokumen Investasi Pemerintah (KURS IP, PKIP, Perjanjian Investasi)• Go Live-nya Investasi Pemerintah
Keterkaitan IS/IKU	<ul style="list-style-type: none">• IS #16 "Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara"• IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (Kemenkeu-Wide Tahun 2021)
Unit in Charge	Subdit. BUMN, Subdit. IPB, Subdit. PPKRI, Subdit. KIHK, Subdit. KPIL, Subdit. Hukum; Dit. SMI dan KPPN Khusus Investasi



BLU Maturity Rating Assessment



BLU MATURITY
RATING

Keterangan

Pengertian	Maturity Rating Assessment BLU disusun untuk memenuhi kebutuhan akan penilaian kinerja BLU yang bersifat komprehensif dan universal. Salah satu milestones dalam transformasi BLU ialah mewujudkan kapabilitas Satuan Kerja yang dapat bersaing di level internasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode penilaian kinerja yang disesuaikan dengan standar global namun tetap mempertimbangkan nature of business masing-masing BLU
Tujuan	Implementasi Pengukuran Maturity Rating Assessment BLU secara bertahap dalam rangka meningkatkan kinerja BLU menjadi lebih baik dan profesional yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Dampak/ Stakeholder	Meningkatkan kualitas layanan publik yang didukung oleh perbaikan kinerja keuangan, kinerja layanan, tata kelola, SDM unggul, integrasi sistem, inovasi dan memperhatikan aspek lingkungan
Acceptance Criteria	<ul style="list-style-type: none">• Tersosialisasinya metode pengukuran maturity rating BLU ke seluruh BLU• Terlaksananya pengukuran maturity rating di 40 BLU pada tahun 2021
Keterkaitan IS/IKU	IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital" IKU - Persentase BLU yang Kinerjanya Baik
Unit in Charge	Subdit Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU, Dit. PPK BLU



BIOS NextGen: Maturity Rating BLU



Keterangan

Pengertian	Modul Maturity Rating BLU pada BIOS-G2 sebagai sarana untuk Self Assesment Maturity Rating yang dapat dilakukan oleh BLU secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan akan penilaian kinerja BLU
Tujuan	Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa BLU diharapkan dapat menjadi agency atau unit-unit yang mampu menjalankan misinya secara good governance , efektivitas dan manfaatnya dirasakan masyarakat, pelayanannya nyata, kinerjanya terekam dan terus diperbaiki, maka diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat maturitas (kemampuan) BLU dalam menjalankan tugas dan fungsi layanannya kepada masyarakat. Digitalisasi implementasi Pengukuran Maturity Rating Assessment BLU dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja BLU menjadi lebih baik dan profesional yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melalui Aplikasi BIOS
Dampak/ <i>Stakeholder</i>	Simplifikasi dan digitalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang didukung oleh perbaikan kinerja keuangan, kinerja layanan, tatakelola, SDM unggul, integrasi sistem, inovasi dan memperhatikan aspek lingkungan
Acceptance Criteria	Tersedianya Modul Maturity Rating pada aplikasi BIOS G-2.2
Keterkaitan IS/IKU	IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital" IKU - Persentase BLU yang Kinerjanya Baik
Unit in Charge	Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU, Dit.PPK BLU & Dit. SITP (Joint QW)



Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan



OTOMATISASI
TELAH LAPORAN KEUANGAN

Keterangan

Pengertian	Telaah adalah kegiatan memeriksa/menganalisis Laporan Keuangan untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya dengan memeriksa kesesuaian suatu laporan dan antar laporan dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Analisis laporan keuangan dilakukan secara terbatas berupa analisis vertikal dan analisis horizontal secara OTOMATIS dan SISTEMATIS melalui fitur telaah yang diintegrasikan pada aplikasi Laporan Keuangan (Modul GL SPAN dan e-Rekon&LK)
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan otomatisasi telaah laporan keuangan (analisis vertikal, analisis horizontal, analisis hubungan antar akun)• Memudahkan dan mempercepat pelaksanaan telaah baik di tingkat satker/KPPN, wilayah/Kanwil DJPb, eselon 1 maupun tingkat KL• Melengkapi fungsi Modul Pelaporan SPAN dan Aplikasi e-Rekon&LK dalam menghasilkan Laporan Keuangan yang relevan, akurat, andal, dan tepat waktu• Menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk melakukan otomatisasi telaah laporan keuangan
Dampak/ <i>Stakeholder</i>	Seluruh satker (UAKPA)/KPPN (UAKBUN-D), UAPPAW/Kanwil DJPb (UAKBUN-W), UAPPA-E1/UAKBUN-P, hingga KL (UAPA)/UA BUN sebagai user , Direktorat APK sebagai Admin User , Direktorat SITP sebagai pengembang aplikasi
Acceptance Criteria	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya Menu/Fitur Analisis Laporan Keuangan secara terintegrasi pada aplikasi SPAN dan aplikasi eRekon&LK• Tersedianya Output Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan dari Aplikasi SPAN dan aplikasi eRekon&LK
Keterkaitan IS/IKU	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung IS #19• Mendukung IKU Kemenkeu One dan Kemenkeu Two yakni persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
Unit in Charge	Subdit. APPKBUN dan BAIBUN, Dit. APK & SITP (Joint QW)



electronic Bank Guarantee (e-BG) Fase I



Keterangan

Pengertian	Mekanisme konfirmasi validitas Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui sistem yang terhubung antara SAKTI dan Perbankan
Tujuan	Menghindari Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang tidak sah/tidak diakui perbankan melalui konfirmasi validitas secara sistem
Dampak/<i>Stakeholder</i>	Satker merasa aman dalam pembayaran sebelum barang/jasa diterima karena dijamin dengan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah dikonfirmasi secara sistem
<i>Acceptance Criteria</i>	<i>Piloting</i> implementasi konfirmasi validitas Garansi Bank minimal pada 1 (satu) bank untuk pembayaran pada akhir Tahun Anggaran 2021.
Keterkaitan IS/IKU	IS #17 "Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital"
<i>Unit in Charge</i>	Subdirektorat HPP Dit. SP dan Dit. SITP (<i>Joint QW</i>)



Rancangan *Treasury Big Data*



Keterangan

Pengertian	Treasury Big Data merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, yang perlu didukung teknologi sistem perbendaharaan yang dapat memanfaatkan data perbendaharaan secara maksimal untuk pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dan untuk penyediaan informasi perbendaharaan yang terpercaya kepada stakeholders
Tujuan	Treasury Big Data bertujuan agar data yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik yang terstruktur maupun tidak, dapat secara efektif diproses untuk menghasilkan pemahaman berdasarkan analisis data untuk mendasari keputusan strategis dan memenuhi kebutuhan informasi. Disusunnya rancangan utama Treasury Big Data agar kebutuhan data analytic dapat disinkronisasikan dan digambarkan dalam satu rancangan utuh
Dampak/ Stakeholder	Treasury Big Data akan menjadi teknologi yang mendasari pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan DJPb di area pelaksanaan anggaran, perencanaan kas, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, manajemen investasi, hingga pelaporan keuangan dan penyediaan informasi perbendaharaan berdasarkan data yang dimiliki dari berbagai sumber, yang akan berdampak ke masyarakat umum
Acceptance Criteria	Rancangan Treasury Big Data sebagai acuan pengembangan Treasury Big Data menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan strategis DJPb, memenuhi kebutuhan stakeholders akan analisis data dan informasi
Keterkaitan IS/IKU	IS Data Analytic Perbendaharaan
Unit in Charge	Subdit PTTI, Subdit PSII, Subdit PSIE, Subdit PPSI, Subdit PI